

Judul : Pemerintah Harus Bayar Bunga Utang Rp405,9 Triliun
Tanggal : Jumat, 25 Maret 2022
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 9

Pemerintah Harus Bayar Bunga Utang Rp405,9 Triliun

JAKARTA—Pemerintah harus memenuhi pembayaran bunga utang dalam APBN 2022 sebesar Rp405,9 triliun dengan total utang pemerintah dan BUMN mencapai hampir Rp9.000 triliun. Beban utang tersebut akan berdampak pada keseimbangan ekonomi makro.

"Terlebih dengan adanya *tapering off*, maka dana akan menjadi langka dan akan semakin kesulitan membayar bunga utang. Rasio utang terhadap PDBN 39,9%," kata Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini saat diskusi Twitter Space bertajuk "Siapa Menanggung Utang?" di Jakarta kemarin.

Menurutnya, tingginya utang tersebut berawal dari 2020 DPR dan pemerintah mengetuk palu untuk pengesahan anggaran utang sebesar Rp660 triliun. Tapi, karena muncul pandemi Covid-19 dan pengaruh *rent seeker*, maka anggaran utang tiba-tiba dinaikkan dan membengkak menjadi Rp1.220

triliun dengan tanpa prosedur yang benar karena wewenang DPR dikebiri. "Tetapi, kemudian realisasinya mencapai Rp1.500 triliun," katanya.

Di sisi lain, ada kesalahan persepsi dalam membandingkan utang Jepang dan negara maju lebih besar dibandingkan Indonesia. Jepang hanya membayar bunga 0,2% per tahun.

"Jadi, jika di misal nyaberutang Rp10.000 triliun, maka hanya membayar bunga utang Rp20 triliun per tahun. Silakan dibandingkan dengan Indonesia yang beban pembayaran bunga utang 2022 sudah mencapai Rp405,9 triliun," katanya.

Dia berpendapat, DPR atau parlemen tidak berani mengkritisi

karena takut. Sementara banyak janji ekonomi pemerintah yang meleset. Misalnya janji pertumbuhan ekonomi 7% setahun ternyata amat jauh dalam realisasinya.

Sementara pencapaian rasio penerimaan pajak dalam negeri amat jauh karena hanya 9% per tahun terhadap PDB. "Sedangkan di zaman Orba bisa mencapai 14% per tahun. *Tax ratio* amat buruk jika dibandingkan dengan Thailand yang 18% dan negara-negara Skandinavia yang mencapai 25% *tax ratio*," sebutnya.

Secara rinci Indef melaporkan, posisi utang pemerintah terakhir sebanyak Rp6.919,15 triliun. Sementara rasio utang

terhadap GDP adalah 39,9%. Pada postur APBN 2022 khususnya segi pembiayaan yang diperoleh dari utang diperkirakan akan mencapai Rp7.500 triliun pada tahun ini, belum termasuk utang BUMN yang jumlahnya di atas Rp2.000 triliun.

Hingga pada kuartal III/2022, total utang publik, utang pemerintah, dan utang BUMN mencapai Rp8.924,27 triliun atau hampir mencapai Rp9.000 triliun. Sebab itu, total pembayaran bunga utang di APBN pada 2022 menjadi naik sebesar Rp405,9 triliun pada 2022 atau 20% dari total belanja pemerintah pusat.

Menteri Keuangan (Men-

keu) Sri Mulyani Indrawati dalam sebuah kesempatan menyoal bahwa pandemi Covid-19 sebagai tantangan yang luar biasa dan harus dihadapi. Tidak hanya mengancam manusia, pandemi ini juga mampu merusak perekonomian suatu negara.

"Kenapa kita harus menambah utang? Seolah-olah menambah utang menjadi tujuan, padahal dia adalah merupakan instrumen untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian kita," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan ada tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga yang melampaui per-

tumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan penerimaan negara.

"Kerentanan utang tahun 2020 telah melampaui batas yang direkomendasikan IMF atau International Debt Relief (IDR)," tulis laporan BPK, Selasa (7/12/2021).

Menurut *data.worldbank.org*, Bank Dunia mencatat bahwa Indonesia menjadi salah satu dalam daftar 10 negara yang memiliki pendapatan kecil menengah dan memiliki utang luar negeri (ULN) terbesar urutan ketujuh pada laporan International Debt Statistics (IDS) atau Statistik Utang Internasional 2021.

nanangwijayanto